



OPEN ACCESS

Vol. 11 No. 1: 19-27
Mei 2018

Peer-Reviewed

AGRIKAN
Jurnal Agribisnis Perikanan (E-ISSN 2598-8298/P-ISSN 1979-6072)
URL: <https://ejournal.stipwunarah.ac.id/index.php/AGRIKAN/>
DOI: 10.29239/j.agrikan.11.1.19-27



Peluang dan Tantangan Industri Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dalam Mendukung Terwujudnya Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku Utara

Ahmad Talib¹

¹Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia

Info Artikel:

Diterima : 10 Mei 2018
Disetujui : 28 Mei 2018
Dipublikasi : 22 Juli 2018

Artikel Penelitian

Keyword:

Maluku Utara, peluang dan tantangan, industri pengolahan, Lumbung ikan nasional

Korespondensi:

Ahmad Talib
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara,
Indonesia

Email: madoks75@yahoo.co.id



Copyright© Mei 2018 AGRIKAN

Abstrak. *Lumbung Ikan Nasional (LIN) adalah merupakan suatu kawasan penghasil produksi perikanan secara berkelanjutan dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan nasional. Lumbung Ikan Nasional berarti menjadikan daerah tersebut sebagai produsen perikanan terbesar, minimal menyediakan stok untuk kebutuhan di daerah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dan studi kepustakaan dari berbagai sumber literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu peningkatan dan penguatan produk olahan hasil perikanan tradisional khas Maluku Utara; dan melengkapi segala fasilitas dalam penerapan cold chain system mulai dari hulu sampai hilir; serta meningkatkan fasilitas Laboratorium Pengolahan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.*

I. PENDAHULUAN

Provinsi Maluku Utara memiliki potensi perikanan yang cukup melimpah yaitu tahun 2015 berjumlah 1.035.230 ton/tahun, sedangkan data perikanan tangkap terus meningkat setiap tahunnya; tahun 2014 adalah sebesar; 217.638 dan 2015; 251.350 ton/tahun, hal ini disebabkan karena perairan Maluku Utara memiliki posisi strategis dan menjadi lintasan migrasi ikan dari samudera pasifik ke perairan Indonesia atau sebaliknya, berbeda dengan perairan lainnya di Indonesia yang hanya ditemukan pada bulan-bulan tertentu. Diperkirakan Potensi Perikanan tangkap mencapai 1,1 juta per tahun dengan potensi lestari sebanyak 500 ton pertahun (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap) (Seri analisis Pembangunan Provinsi Maluku Utara, 2015).

Ikan tuna, tongkol dan cakalang merupakan komoditas perikanan yang paling banyak jumlahnya di Provinsi Maluku Utara yaitu di kabupaten Morotai, Halmahera Tengah, Ternate, Tidore, Halbau, Halmahera Barat, Sula sebesar 84.236 ton/tahun. Secara umum komoditas cakalang dan tuna adalah komoditas yang berbasis penangkapan sehingga komoditas ini tidak sepenuhnya dapat menjamin

ketersediaan stok. Hal ini karena perikanan tangkap sangat tergantung pada kondisi alam dan musim. Namun disisi lain yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan komoditas unggulan di pulau-pulau kecil antara lain; (1) Peralatan penangkapan yang masih tradisional; (2) Terbatasnya infrastruktur misalnya pasokan listrik dan pabrik es yang tidak tersedia dipulau kecil; dan (3) Optimalisasi pengawasan dan regulasi dalam usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan (Seri analisis pembangunan wilayah Provinsi Maluku Utara, 2015). Tantangan yang dihadapi pada industri perikanan adalah; 1) Rendahnya daya saing dan tingkat pendapatan pelaku usaha (UKM) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 2) Kurangnya nilai tambah produk pengolahan perikanan; 3) Memasuki masyarakat ekonomi asen (MEA) persaingan semakin ketat; 4) Belum meratanya distribusi ikan untuk konsumsi dan pemenuhan bahan baku industri; 5) Belum meratanya pemenuhan protein hewani yang bersumber dari ikan (Hutagalung, 2013). Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu didorong untuk menuju industrialisasi perikanan.

Menurut Dewantoro (2011) dalam Utoyo (2011) bahwa pengertian industri secara luas mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Program industrialisasi di Indonesia telah dicanangkan sejak era Orde Baru, yang bercita-cita menuju masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan bertahap yaitu Pembangunan Lima Tahunan (PELITA) I sampai dengan PELITA V mulai tahun 1973 sampai dengan tahun 1998, pada prinsipnya berupa transformasi dari negara pertanian menjadi negara industri. Di era Reformasi, cita-cita negara menuju masyarakat yang adil dan makmur, yaitu masyarakat yang mandiri dan maju, era ini hingga tahun 2024, yang dibagi menjadi 4 tahap 5 tahunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan tujuan akhirnya yaitu "Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional" (Pembangunan kelautan dalam RPJMN, 2015-2019).

Khusus di bidang kelautan dan perikanan, salah satu prioritas yang harus dilakukan pada RPJMN 2015-2019 adalah " Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal dan berkelanjutan". Terlihat bahwa program industrialisasi perikanan masih relevan hingga saat ini sehingga dalam konsep Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI), industri merupakan salah satu dari 8 Program Utama yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika, dan pengembangan kawasan strategis (Anonim., 2011). Program industrialisasi kelautan dan perikanan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan ini merupakan kebijakan strategis dalam menggerakkan seluruh potensi perikanan dari hulu sampai hilir, melalui pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap sebagai industri hulu dan pengolahan hasil produk perikanan sebagai industri hilir. Beberapa kebijakan operasional yang dapat dikembangkan dalam rangka penerapan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan serta mendukung ketahanan pangan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) antara lain : (1) Membatasi ekspor bahan baku hasil perikanan; (2) Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan

berdaya saing tinggi berorientasi pasar; (3) Peningkatan mutu dan keamanan produk; (4) Pengembangan industri perikanan berbasis clean technology dan zero waste concept; (5) Peningkatan armada perikanan tangkap; (6) Pengembangan sistem logistik ikan nasional (SLIN); (7) Peningkatan kerjasama regional di bidang manajemen sumber daya perikanan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dan studi kepustakaan dari berbagai sumber tentang model keberhasilan Lumbung Ikan Nasional di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

3.1. Komoditas Perikanan dan harga jual

Komoditi perikanan dalam mendukung industri maka yang harus dilakukan termasuk dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah: (1) industri pengalengan ikan dan biota perairan lain; (2) industri pengasapan ikan dan biota perairan lain; (3) industri pembekuan ikan dan biota perairan lain (dikecualikan pembekuan ikan di laut) dan; (4) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lain. Industri pengolahan hasil perikanan merupakan kegiatan yang mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi lebih tinggi sebagai outputnya. Proses transformasi tersebut dapat dilakukan baik secara fisik, kimia, biologis, maupun kombinasi diantara ketiganya. Dengan demikian, dalam melakukan proses transformasi, rekayasa penerapan teknologi maupun bioteknologi menjadi power atau kekuatan dalam memaksimalkan nilai tambah yang akan diperoleh sehingga menjadi efek pengganda ekonomi bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Peran sentral dari industri pengolahan hasil perikanan dalam pembangunan nasional adalah: Penyedia lapangan kerja, Industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang baru memanfaatkan 40 persen dari hasil produksi perikanan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6.205.189 orang pada tahun 2013. Seandainya, tingkat pemanfaatan produksi perikanan untuk pengolahan ditingkatkan menjadi 80 persen maka tenaga kerja yang diserap akan meningkat menjadi 12 juta-an orang. Angka tersebut sangat signifikan untuk menurunkan angka pengangguran di Indonesia.

Sumber peningkatan devisa negara melalui peningkatan nilai tambah, ikan tuna senilai US\$ 700.000 bila diolah menjadi ikan kaleng akan dihasilkan produk senilai US\$ 1.240.000 dan produk samping berupa tepung ikan senilai sekitar Rp.500.000.000,-. Pada produk rumput laut jenis karaginofit *Eucheuma cottonii* dapat ditingkatkan nilai tambahnya dengan mengolahnya menjadi berbagai jenis produk seperti alkali treated cottonii (ATC), semi refined carragenan (SRC), refined carragenan dan karaginan kertas yang nilai tambahnya dapat mencapai hampir 450%.

Industrialisasi pengolahan hasil perikanan harus menjadi objek kegiatan utama di sektor perikanan dalam penanganan dan pengembangannya. Penanganan industri pengolahan hasil perikanan hendaknya dilakukan dengan baik dan benar, begitu pula dengan arah pengembangannya. Hal ini karena industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia memiliki banyak peluang disamping tantangan yang ada. Peluang industri pengolahan hasil perikanan adalah sebagai berikut: 1). pasar domestik maupun ekspor produk olahan hasil perikanan yang masih terbuka luas; 2) adanya dukungan pemerintah yang kuat terhadap keberlangsungan industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia; 3) adanya kecenderungan peningkatan permintaan olahan siap saji oleh konsumen; 4) adanya potensi ketersediaan bahan baku yang besar, serta; 5) adanya ketersediaan tenaga kerja yang melimpah.

3.2. Tantangan yang harus dihadapi saat ini

Tantangan untuk industri pengolahan ikan di Indonesia adalah persaingan yang sangat ketat dalam mendapatkan bahan baku ikan segar, negara pesaing telah menerapkan integrated technology yang memungkinkan pengolahan di laut yang belum diterapkan oleh industri pengolahan ikan dalam negeri, persyaratan ekspor semakin ketat, masih adanya Illegal Fishing dan transshipment ikan dilaut, kenaikan harga bahan bakar minyak dan masih adanya persepsi negatif pada perdagangan internasional seperti adanya zat pengawet (Mercury Issue) dan ikan yang tidak segar dari Indonesia. Dalam upaya mensukseskan peran industri pengolahan hasil perikanan dalam pembangunan Nasional dengan memperhatikan peluang dan tantangan yang ada, maka beberapa hal perlu dilakukan antara lain: peningkatan jumlah kapal armada penangkapan yang berskala besar (200 GT ke atas), peningkatan pemberlakuan atau penerapan Hazard Analysis Critical Control

Point (HACCP) bagi unit pengolahan ikan (UPI) atau industri pengolahan ikan, dan peningkatan pendidikan dan pelatihan tentang teknik pengolahan yang baik.

Sejak penancangan industrialisasi perikanan 2011 dan menjadi makin populer tahun 2012 sektor perikanan mulai melakukan pembenahan. Pembenahan tersebut dimulai dengan mendorong peningkatan produksi perikanan untuk komoditas yang potensial dikembangkan secara ekonomi. Beberapa komoditas unggulan di Maluku Utara adalah tuna, cakalang dan tongkol (TTC), udang dan rumput laut. Sementara itu komoditas tangkap terus digenjut untuk mendukung industri UMKM (pengolahan) seperti ikan asin, kerupuk ikan, abon, ikan asap dan pindang. Namun setelah beberapa tahun berjalan, belum terlihat perkembangan yang signifikan dari tahapan pencapaian program tersebut. Permasalahan terus menggeluti bagi usaha mulai dari bahan baku yang langka serta mahal, logistik yang tidak tersedia, sampai pada kebijakan impor dari pemerintah pada jenis hasil perikanan tertentu. Berdasarkan data masih ada industri pengolahan ikan nasional yang masih mengimpor bahan baku hal ini disebabkan karena; (a) Terjadi kekurangan bahan baku; (b) stok ikan yang tersedia tidak cukup untuk kebutuhan industri; (c) logistik perikanan yang tidak memadai; (d) kecukupan bahan baku merupakan kunci utama keberhasilan industrialisasi; dan (e) distribusi stok yang tidak merata antara wilayah pengelolaan perikanan dimana sebagian besar stok bahan baku terdapat di wilayah timur Indonesia. Untuk menjamin ketersediaan bahan baku secara kontinyu dan berkesinambungan diperlukan sistem tata niaga (logistik) yang kuat dan tangguh; (f) sistem logistik perikanan harus dikembangkan atau dibangun mulai dari pusat stok ikan (stocking area), perkapalan dan sistem pendukung termasuk bahan bakar; (g) perlu intervensi berupa komitmen kebijakan pemerintah untuk tidak memberlakukan impor terhadap ikan yang menjadi bahan baku dan tersedia di perairan Indonesia.

Untuk mendorong peningkatan penyerapan pasar terhadap hasil industri pengolahan perikanan ke pasar lokal yang ditingkatkan ke pasar berstandar internasional. Gagasan industrialisasi bukan gagasan omong kosong jika diikuti dengan upaya untuk membangun setiap rantai sistem usaha tersebut. Namun akan menjadi omong kosong apabila nelayan, pembudidaya,

pengolah dan pedagang tidak dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penghasilan mereka (Yonvitner, 2015). Nelayan kita menyediakan bahan pangan secara keseluruhan dari budidaya dan tangkap mencapai 12,7 juta ton per tahun termasuk 4,3 juta ton dari rumput laut (KKP, 2011). Artinya 8,4 juta ton komoditas perikanan akan mampu memenuhi tingkat konsumsi pangan ikan masyarakat Indonesia setiap tahunnya yang hanya mencapai 7,1 juta ton. Secara logika kita mendapati ternyata ketersediaan ikan nasional cukup untuk menopang bergeraknya industri perikanan karena kebutuhan ikan yang mencapai 7,1 juta ton tersebut termasuk di dalamnya ikan olahan yang diolah UMKM lebih kurang 3 juta ton (Heruwati, 2002).

3.3. Kebijakan Pemerintah Pusat

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, hingga saat ini tercatat 569 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mengolah berbagai jenis hasil perikanan yaitu ikan, udang, tuna, kepiting, kekerangan, gurita, cumi-cumi, rumput laut, dan lain-lain (Retnowati, 2011). Jenis olahan UPI tersebut antara lain adalah pembekuan, baik berupa ikan utuh, potongan, atau filet, pengalengan, minyak ikan, tepung ikan, serta jenis olahan sekunder seperti bakso, nugget, kerupuk, dan lain-lain. Adapun pengasinan, pemindangan, pembuatan kecap, terasi, petis, dan lain-lain masih dilakukan oleh industri rumah tangga dengan teknologi tradisional, yang berjumlah ribuan unit dan tersebar di semua wilayah di Indonesia. Baik pada skala besar maupun kecil, industri pengolahan dapat menggerakkan banyak industri pendukung, antara lain, industri bahan tambahan, pabrik es, industri bahan pengemas, serta industri mesin pengolahan dan pengemasan. Masalah yang hingga saat ini masih dihadapi oleh para pengolah ikan adalah seringnya terjadi kelangkaan pasokan bahan baku.

Kelangkaan ikan sebagai bahan baku olahan dapat terjadi karena berbagai hal, antara lain: 1). Saat tidak musim ikan, penangkap lebih suka mengekspor ikannya dari pada menjualnya ke pengolah di dalam negeri, 2). Karena stok ikan di laut memang sudah menipis, atau 3). Tidak harmonisnya hubungan antara penangkap dengan pengolah sehingga bila harga jual ikan segar di luar negeri lebih tinggi, penangkap lebih suka mengekspor ikan sejenisnya daripada menjualnya kepada pengolah di dalam negeri. Untuk mengatasi ini berbagai upaya telah dilakukan oleh

pemerintah, antara lain melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan PerMen KP No. PER. 12/MEN/2009 tentang keharusan mempunyai industri pengolahan bagi kapal asing yang akan beroperasi di Indonesia, atau Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan No. KEP.033/DJ-P2HP/ 2008 yang mengatur jenis-jenis ikan yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sehingga diijinkan untuk di ekspor dalam bentuk segar. Keputusan ini akhirnya dicabut setelah berkali-kali mengalami perubahan akibat terjadinya tarik menarik kepentingan antara pihak penangkap dengan pihak pengolah. Hal lain yang masih merupakan tantangan industri pengolahan ikan adalah rendahnya pangsa dan penetrasi pasar, serta kurangnya inovasi pengolahan ikan, khususnya hasil budidaya untuk mengantisipasi produksi ikan budidaya yang berlebih yang diprogramkan pada empat tahun ke depan. Industri pengolahan berbasis bioteknologi seperti pemanfaatan senyawa aktif asal biota laut seperti mikro dan makroalga penghasil bahan-bahan obat dan farmasi belum dikembangkan secara optimal. Pengembangan industri tersebut berpotensi ekonomi tinggi, dapat mencapai empat miliar dolar Amerika (Dahuri, 2002).

3.4. Pengembangan Industri

Pengembangan industri perikanan saat ini masih sangat bervariasi, berupa kelompok-kelompok usaha bersama, koperasi, maupun perusahaan yang berdiri sendiri atau yang bermitra dengan usaha-usaha kecil di sekitarnya. Untuk itu perlu dilakukan studi dan evaluasi terhadap kondisi riil dan empiris di lapangan mengenai bentuk-bentuk kelembagaan tradisional, yang dikembangkan oleh pemerintah, maupun oleh pengusaha. Beberapa kasus dari pengembangan industri tersebut perlu dikaji kekuatan dan kelemahannya, untuk kemudian digunakan sebagai landasan bagi penyusunan pemikiran teoritik. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba dengan membuat penyesuaian atau penyempurnaan pada satu atau dua kasus yang kemudian dirangkai menjadi suatu model.

Hal ini sangat penting mengingat besarnya keragaman karakteristik lingkungan, fisik, geografis, ekonomi, intelektual, religi, budaya, dan sosial masyarakat Indonesia. Model pemberdayaan ideal industri perikanan di Indonesia yang diajukan haruslah

AGRIKULTUR UMMU-TERNATE

menggambarkan ciri inklusif dan holistik, dengan penekanan pada daya saing, bersifat non tradisional dan komersial, terutama dilihat dari pengembangan bisnis perikanan yang tangguh. Di samping itu, beberapa inovasi berikut perlu dikembangkan mengiringi program industrialisasi perikanan antara lain adalah: (1) Inovasi teknologi alat tangkap ikan ramah lingkungan; (2) Inovasi teknologi dan bioteknologi benih unggul; (3) Inovasi teknologi pakan ikan budidaya, baik pakan alami maupun pakan buatan; (4) Inovasi teknologi dan bioteknologi bioremediasi serta pembersihan air dan lingkungan; (5) Inovasi teknologi dan bioteknologi vaksin dan obat ikan; (6) Inovasi teknologi pengolahan ikan hasil budidaya termasuk teknologi pemanfaatan limbah ikan; (7) Inovasi teknologi dan bioteknologi senyawa aktif dan nutrasetikal dari bahan asal laut; (8) Inovasi sistem atau model industri yang sesuai dengan sumberdaya, baik sumberdaya ikan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia; (9) Inovasi sistem kebijakan industri yang sesuai dengan kondisi fisik dan sosial, ekonomi, politik dan budaya Indonesia. Semoga dengan beberapa strategi inovasi di atas merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi agar cita-cita industrialisasi, baik untuk perikanan tangkap, budidaya, maupun industri pengolahan ikan dapat tercapai. Industri perikanan di Maluku Utara bisa berhasil jika proses penyimpanan dan pembekuan serta pengolahan dapat berjalan dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan visi baru untuk menjadi produsen perikanan terbesar pada tahun 2015, sejak akhir tahun 2009 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berkomitmen untuk meningkatkan produksi ikan sebesar 353%. Untuk itu pengkajian dan perumusan strategi yang tepat merupakan langkah yang bijak agar terjadi sinergi antar berbagai pihak terkait sehingga peningkatan produksi dapat tercapai secara efektif dan efisien tanpa harus mengeksploitasi sumberdaya secara berlebihan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perikanan tangkap baik di laut maupun perairan umum merupakan salah satu jalan yang paling mudah dan relatif murah untuk meningkatkan produksi perikanan, karena pada dasarnya perikanan tangkap bersifat perburuan, dan hanya memerlukan biaya modal untuk menangkap ikan. Akan tetapi ada permasalahan besar yang dihadapi yaitu adanya dugaan telah banyaknya stok sumberdaya ikan, tidak saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia sehingga potensi yang masih terbuka sepenuhnya hanyalah spesies laut

dalam, yang tentu saja ini memerlukan teknologi dan biaya yang sangat tinggi. Terlebih, diperlukan kehati-hatian dalam hal jenis dan lokasi untuk melakukan eksploitasi sumberdaya ikan. Peluang berikutnya tentu berada pada perikanan budidaya, mengingat Indonesia masih memiliki potensi lahan budidaya yang cukup besar, yang saat ini belum digarap secara optimal. Namun ada juga permasalahan yang dihadapi sektor ini antara lain mahal biaya untuk pembelian pakan ikan dan ketersediaan bahan baku pakan, terutama tepung ikan. Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah masih kurangnya penguasaan teknologi pembenihan, teknologi budidaya, dan penanggulangan penyakit, serta pengelolaan lingkungan budidaya. Di samping itu, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya masih harus menghadapi masalah sosial berupa pencurian dan perampokan ikan (Koeshendrajana, 2010). Alternatif lain untuk meningkatkan produksi ikan, dapat juga dilakukan dengan mereduksi susut hasil setelah ikan ditangkap. Bila dilakukan dengan baik, reduksi susut hasil dapat berfungsi ganda, pertama mengurangi jumlah (volume) produksi ikan yang ditangkap dan kedua meningkatkan nilai (value) dengan cara mempertahankan mutu kesegaran ikan. Peningkatan jumlah tangkapan tanpa mempertimbangkan susut hasil fisik maupun susut nilai ekonomis (karena kerusakan mutu ikan) adalah suatu pemborosan yang sia-sia.

Peningkatan nilai ekonomis bahkan dapat diupayakan dengan melakukan pengolahan ikan, karena nilai tambah yang diperoleh melalui pengolahan primer, sekunder, atau tersier dapat mencapai 250% (Sutjiamidjaja, 1999). Peningkatan produksi juga dapat diperoleh bila penangkapan ilegal, tidak terdaftar, dan melanggar peraturan (IUU fishing) dapat diatasi. Bila semua peluang tersebut di atas dapat dimanfaatkan, maka baik perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan akan beroperasi pada skala besar. Berbicara pada tataran produksi skala besar, mau tidak mau pertimbangan masalah bisnis harus dipikirkan, karena sangat terkait dengan globalisasi perdagangan yang tentu saja tidak dapat dihindari. Disisi lain kecenderungan konsumen dalam mengkonsumsi ikan dan turunannya terus meningkat pada tahun 2015 sebesar 41,11 kg/kap/th melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 40,90 kg/kap/th (100,51 persen). Sementara itu, penyediaan konsumsi ikan untuk konsumsi domestik tahun 2014 mencapai 13,07 juta ton atau meningkat

sebesar 10,01 persen dibandingkan tahun 2013. Peningkatan penyediaan ikan diikuti juga dengan peningkatan penyediaan ikan per kapita yang mencapai 51,80 kg/kap/tahun atau meningkat sebesar 8,44 persen dibandingkan tahun 2013 (Abdurahman, 2015).

Peningkatan penyediaan ikan tahun 2014 sudah mulai diikuti dengan peningkatan konsumsi ikan, hal ini terlihat dari peningkatan penyediaan ikan (kg/kap/tahun) tahun 2013-2014 sebesar 8,44 persen sedangkan peningkatan konsumsi ikan (kg/kap/tahun) tahun 2013-2014 sebesar 8,32 persen. Bahkan peningkatan konsumsi ikan tahun 2013-2014 lebih besar dari peningkatan ikan tahun 2010-2014 (5,78 persen). Peningkatan konsumsi ikan selama 5 tahun terakhir merupakan hasil dukungan dari berbagai kegiatan atau kampanye tentang gemar ikan kepada masyarakat. Konsumsi ikan terbesar tahun 2014 terdapat pada Provinsi Maluku (54,12 kg/kap/tahun), Provinsi Sulawesi Tenggara (50,77 kg/kap/tahun), Provinsi Kep. Riau (49,24 kg/kap/tahun), Provinsi Maluku Utara (48,88 kg/kap/tahun), Provinsi Papua Barat (48,16 kg/kap/tahun), dan Provinsi Sulawesi Utara (47,83 kg/kap/tahun) (Dijen PDSPKP, 2014).

3.5. Implementasi SLIN dan LIN

Dalam mendukung ketersediaan bahan baku maka strategi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah mengimplementasikan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). SLIN merupakan sistem manajemen rantai pasokan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Implementasi SLIN membutuhkan sinergitas antara seluruh stakeholder yang terlibat dalam aktivitas dari hulu yaitu sisi produksi sampai dengan hilir yaitu sisi pengolahan, distribusi dan pemasaran.

Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional sangat strategis dalam peningkatan daya saing dan upaya penguatan kedaulatan pangan. Sistem Logistik Ikan Nasional akan berkontribusi positif terhadap pembinaan mutu ikan, mengurangi biaya paska produksi dan meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi dalam negeri serta mengurangi impor ikan dan

bahan baku industri pengolahan. Melalui penguatan logistik di pulau-pulau dan khususnya di kawasan timur Indonesia serta peningkatan jasa transportasi laut, diharapkan akan membantu upaya penanggulangan praktek IUU fishing. Penyebaran SLIN di Indonesia sudah mencapai 13 Provinsi dan 25 kabupaten kota dan kita Maluku Utara patut bersyukur, karena kita berada di dalamnya dan yang menjadi pilot project pengembangan SLIN di Maluku Utara adalah kabupaten Halmahera Selatan. Dalam mempercepat proses SLIN di Halmahera Selatan Tim pokja sudah bekerja untuk menyiapkan infrastruktur termasuk di dalamnya pembentukan unit-unit koperasi perikanan, untuk mempercepat proses tersebut pengelolaannya diserahkan kepada PT. Perikanan Nusantara Persero. Program SLIN pada dasarnya dilakukan untuk mendukung Program LIN yang dirancang sebagai bagian dari SLIN, dimana kegiatan LIN adalah bagian dari satu atau semua sub sistem dalam SLIN dan dapat juga terintegrasi dengan sub sistem lain dari SLIN pada wilayah di luar wilayah LIN Maluku Utara.

Secara harfiah Lumbung Ikan Nasional (LIN) adalah suatu kawasan penghasil produksi perikanan secara berkelanjutan dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan nasional. Bawole dan Apituley (2011) mengatakan bahwa membangun Lumbung Ikan Nasional berarti menjadikan daerah tersebut sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia, yang mampu mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional serta menjadi eksportir utama komoditas perikanan Indonesia. Sementara menurut Watloly (2010), secara filosofi lumbung memiliki 2 arti yaitu statis (penyimpan) dan dinamis (keberlanjutan). Arti statis adalah; 1) Tempat penyimpan stok (pangan dan bibit) secara temporer; 2) Tempat menyimpan barang hasil jadi (statis); 3) Dapat dikosongkan sesuai irama dan siklus musim; 4) Terisolasi dari lingkungan habitat; 5) Bukan tempat produk lestari. Sedangkan arti dinamis (keberlanjutan) adalah 1) Tempat bereproduksi, bereproduksi berjenis ikan secara lestari; 2) Ajang tabur-tuai yang selalu terisi; 3) Menjadi sentra produksi dan pertumbuhan habitat baru; 4) Menyatu dengan lingkungan habitat, terisi dan berkelanjutan; dan 5) Wilayah tangkap dan produk lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan hal tersebut maka, untuk mempercepat Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku Utara, perlu menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mewujudkan

LIN di Maluku Utara dengan menyiapkan segala fasilitas pendukung berupa pabrik dan cold storage atau ruang pendingin dan ruang pembekuan (air blast freezer, ABF) serta transportasi laut sebagaimana diatur dalam Perpres No. 26/2012 di bidang kelautan dan perikanan serta sumber daya manusia yang handal di bidang perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan perikanan dalam mendukung Lumbung Ikan Nasional.

Hal yang sama diperkuat oleh Instruksi Presiden No.7 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan, guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa Negara.

Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga termasuk para Gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia untuk melakukan percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Langkah-langkah strategis yang diambil adalah: (a). peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan; (b). perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing; (c). percepatan penataan pengelolaan ruang laut dan pemetaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan daya dukung dan sumber daya ikan dan pengawasan sumber daya perikanan; (d). penyediaan sarana dan prasarana dasar dan pendukung industri perikanan nasional; (e). percepatan peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan bidang perikanan; (f). percepatan pelayanan perizinan di bidang industri perikanan nasional; dan (g). penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Semoga hal ini bisa terwujud, dengan mempercepat infrastruktur, kelembagaan dan bantuan lunak kepada nelayan di Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku Utara, menuju lumbung ikan nasional di tahun 2017 bisa tercapai.

IV. PENUTUP

Sumberdaya alam di Maluku Utara khususnya di bidang Perikanan sangat melimpah oleh karena itu dibutuhkan dukungan sumberdaya manusia yang handal untuk

mengelolanya, disamping itu diperlukan keterampilan dan teknologi untuk mengelolah sumberdaya tersebut, sehingga memerlukan strategi sebagai berikut; (a) melakukan intervensi pasar sehingga harga ikan tetap stabil di Provinsi Maluku Utara; (b) untuk menjamin ketersediaan bahan baku secara kontinyu dan berkesinambungan maka diperlukan sistem tata niaga (logistik) yang kuat dan tangguh dengan dibangun sistem logistik perikanan dengan dilengkapi pusat stok ikan (stocking area), perkapalan dan sistem pendukung termasuk bahan bakar; (c) perlu intervensi berupa komitmen kebijakan pemerintah daerah untuk menstabilkan harga ikan di pasar-pasar tradisional; (d) melakukan ekspansi produk olahan perikanan ke level nasional maupun internasional dengan mutu dan kemasan yang menarik. Berdasarkan analisis internal dan eksternal tentang "Peluang Sekaligus Tantangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan dalam Mendukung Terwujudnya Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku Utara" diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

4.1. Peningkatan dan Penguatan Produk Olahan Hasil Perikanan Tradisional Khas Maluku Utara

Usaha pengolahan hasil perikanan di Maluku Utara didominasi usaha kecil menengah dengan permasalahannya yang kompleks baik dari aspek teknologi, sarana dan fasilitas pengolahan, sumberdaya manusia maupun manajemen. Produk olahan berbahan dasar ikan yang diproduksi oleh usaha kecil menengah kurang beragam dan hanya beberapa produk saja misalnya abon ikan, kerupuk ikan (kamplang), terasi (balacang), kecap ikan, ikan asap (ikan fufu), ikan asin (ikan garam), dan pindang itupun jumlahnya terbatas serta desain kemasan yang kurang menarik. Oleh karena itu diperlukan pelatihan dan keterampilan tentang diversifikasi produk olahan berbahan dasar ikan sehingga bisa menjadi produk unggulan lokal sebagai buah tangan (ole-ole) khas Maluku Utara dengan nilai jual tinggi, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut:

Melakukan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan penerapan good handling practices (GHP), good manufacturing practices (GMP) dan aspek manajerial terhadap produk-produk olahan UKM unggulan di Maluku Utara.

Pemerintah daerah ikut serta dalam melakukan perbaikan peralatan dan fasilitas pengolahan yang standar untuk produk makanan

melalui proyek percontohan berupa sentra-sentra pengolahan ikan UKM berstandar ekspor melalui bantuan bantuan lunak.

Menambah pembangunan house packaging termasuk desain kemasan dan pelabelan, untuk dapat memperpanjang daya simpan produk, memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan nilai jual.

Pemerintah dan UKM ikut dalam melakukan promosi investasi, pengembangan skim modal kerja dan penyusunan pola kemitraan usaha pengolahan.

Pengembangan produk olahan bernilai tambah melalui pembangunan industri pengolahan modern yang berdaya saing dengan pengembangan produk (product development) bernilai tambah tinggi yang sudah mempunyai pasar misalnya produk breaded shrimp atau fish, tuna loin, tuna steak, surimi dan produk-produk olahan berbahan baku surimi (surimi based products) juga perlu dikembangkan misalnya otak-otak, chikuwa, nugget dan siomay karena bahan baku cukup tersedia di Maluku Utara.

4.2. Melengkapi Fasilitas dalam Penerapan Cold Chain System

Tingginya losses terhadap hasil tangkapan sekitar 30% (nilai rata-rata) dikarenakan beberapa hal: (a) armada penangkapan ikan sebesar 85% didominasi oleh nelayan skala kecil yang tanpa dilengkapi dengan fasilitas pendingin (es, cool box) dan waktu tripnya yang cukup lama karena fishing ground-nya jauh; (b) fasilitas pendaratan dan pelelangan ikan yang tidak atau kurang

memenuhi standar; (c) tidak ada atau kurangnya fasilitas pendukung seperti pabrik es dan pasokan air bersih. Walaupun prinsip-prinsip rantai dingin telah diterapkan di beberapa kabupaten/kota, namun masih terbatas dan tidak bisa menjangkau semua oleh nelayan atau pelaku usaha. Program-program yang dapat dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah: (a) percepatan penerapan sistem rantai dingin diatas kapal; (b) introduksi penggunaan cool box di sentra pendaratan, pelelangan dan distribusi ikan; (c) memfasilitasi penyediaan sarana cool chain system (pabrik es, cold storage, chilling room, pasokan air bersih).

4.3. Melengkapi Fasilitas Laboratorium Pengolahan dan Pengujian Mutu

Meningkatnya persyaratan impor hasil perikanan dengan berbagai persyaratan mutu oleh negara-negara pengimpor sehingga diperlukan Laboratorium yang berstandarisasi untuk mutu hasil perikanan karena masing-masing negara pengimpor mempunyai persyaratan mutu yang berbeda-beda. Apalagi dalam memasuki Masyarakat Ekonomi Asian (MEA) akan terjadi persaingan dari negara-negara yang mempunyai struktur ekspor sejenis, seperti Vietnam, China, Thailand, Philipina, dan Malaysia. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan terhadap persyaratan mutu, maka laboratorium pengujian di Maluku Utara harus dilengkapi dengan peralatan tersebut sehingga secara kelembagaan laboratorium tersebut dapat mengeluarkan sertifikat mutu yang diakui secara nasional maupun internasional

REFERENSI

- Abdurahman, 2015. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan.
- Anonim. 2011. MP3EI 2011-2025. Lampiran Perpres No.32/2011. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Bawole, D. dan Y.M.T.N. Apituley. 2011. Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional: Tinjauan atas Suatu Kebijakan. Prosiding Seminar Nasional: Pengembangan Pulau-Pulau Kecil 2011. Hal 239-246. ISBN: 978-60298439-2-7.
- Dahuri, R. 2002. Perikanan sebagai sektor andalan nasional dalam Kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Menggapai cita-cita luhur. Cholik, F., Heruwati, E.S., Jauzi, A., dan Basuki, P.I. (Eds). ISPIKANI. 13-39.
- Dewantoro, B. 2011. http://bagusdewan.blogspot.com/2011/04/definisi_industri.html. Diakses pada tanggal 2 Januari 2011.
- Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2016. Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia.
- Heruwati, E.S. 2002. Pengolahan Ikan Secara Tradisional. (<http://www.pustakadeptan.go.id>). Instruksi Presiden No.7 tahun 2016. Tentang Percepatan Industri Perikanan.

- Kemenetrian Kelautan dan Perikanan. 2011. Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya RI. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.**
- Koeshendrajana, S. 2010. Isu Pemasaran Ikan: Strategi Menghadapi Program Peningkatan Produksi i Ikan Budidaya. Presentasi dalam Focus Group Discussion Strategi menghadapi program peningkatan produksi ikan budidaya, Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Jakarta 12 Mei 2010.**
- Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Perikanan dan Kelautan, (2016). Nomor 01/PUSDATIN/I/2016.**
- Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional, 2015-2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2014.**
- Retnowati, N. 2011. Kebijakan Pemanfaatan Limbah Hasil Perikanan. Direktorat Pengolahan, Ditjen P2HP. Focus Group Discussion: Mengubah Limbah Menjadi Hasil Samping Bernilai Tambah. BBP4B-KP.**
- Pembangunan Kelautan dalam RPJMN, 2015-2019. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan pembangunan Nasional**
- RPJMD Maluku Utara 2014 diolah oleh RDI 2015, Road Map Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Provinsi Maluku Utara Sebagai Lumbung Ikan Nasional dan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.**
- Hutagalung Saut P, 2013. Implementasi Blue Economy di dalam Industrialisasi Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.**
- Seri analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Maluku Utara, 2015.**
- Suryawati, S.H dan Tajerin, 2015. Penilaian Kesiapan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional Evaluation of Readiness for Maluku as "Lumbung Ikan Nasional" Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Jakarta Utara.**
- Sutjiamidjaja, I. dan Sutjiamidjaja, H. 1999. Program pengembangan perikanan Indonesia sebagai sumber kesejahteraan nelayan, Lowongan pekerjaan, serta devisa Negara. Pembahasan PROTEKAN 2003. Ditjenkan, Deptan.**
- Utoyo, B. 2011. Pengertian dan Definisi Industri. http://ca.rapedia.com/pertanian/definisi_info_2063.html. Diakses pada tanggal 2 Januari 2011.**
- Watloly A. 2010. Filosofi Lumbung Ikan: Implikasi bagi Maluku dan Indonesia. Materi Ceramah Seminar Nasional: Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional.**
- Yonvitner, 2015. Bahan Baku: Urat Nadi Industri Pengolahan Perikanan Mikro Kecil Dan Menengah Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.**